

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMOGOKAN BURUH: STUDI TENTANG TINGKAT KESEJAHTERAAN, JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, PERASAAN ALIENASI, EFEKTIFITAS ORGANISASI BURUH DAN STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP BURUH INDUSTRI DI KOTAMADYA SURABAYA DAN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO (Muhammad Asfar, Sutrisno, Endang Dwiyaniti, 1995, 83 halaman)

Beberapa tahun terkhhir ini, khususnya setelah Kepres No. 27 tahun 1990 tentang pancabutan larangan mogok, terjadi peningkatan aksi unjuk sara atau mogok kerja di kalangan buruh industri. Pertanyaannya adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi aksi pemogokan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sosial ekonomi, jaminan kesejahteraan, tingkat alienasi, efektivitas organisasi buruh (SPSI), sekaligus mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan yang menyebabkan pemogokan buruh.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Rungkut Kodya Surabaya dan Kecamatan Waru Kabupaten Sidorajo, yang keduanya merupakan pusat industri di wilayah masing-masing. Populasi penelitian adalah para buruh yang pernah melakukan mogok, dengan mengambil 200 responden sebagai sampel melalui teknik *snowball sampling*. Pengumpulan datanya melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk essay.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya para buruh

yang diteliti adalah berjenis kelamin wanita dan belum kawin. Tingkat kesejahteraan para buruh umumnya masih belum memadai. Hal ini dapat diamati dari ketidakmampuan buruh dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari, seperti makan, pakaian dan fasilitas perumahan.

Para buruh yang diteliti meskipun tergolong rentan namun mempunyai banyak strategi dalam mengatasi kesulitan ekonomi sehari-hari. Di antara strategi yang biasa dikembangkan para buruh mulai dari upaya mandiri seperti menghemat pengeluaran melalui mengurangi frekuensi makan, mengurangi jatah menu makan, mengurangi jatah jajan dan rekreasi dan sebagainya. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, para buruh biasanya berhutang dan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya..

Kebanyakan para buruh merasa teralienasi. Dan perasaan teralienasi ini ternyata bersejajaran dengan keterlibatan mereka dalam aksi-aksi pemogokan. Umumnya para buruh menilai organisasi SPSI tidak dapat menyalurkan dan mendesakkan kepentingan dan aspirasi anggotanya terhadap pihak pengusaha. Sementara itu, sebagian besar para buruh menilai jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang ada masih tidak memadai.

Sebagian besar buruh mengaku sebab utama mereka melakukan pemogokan adalah karena rendahnya upah, disusul disebabkan belum memadainya jaminan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, tidak adanya unit SPSI di perusahaan masing-masing sekaligus belum efektifnya SPSI, dan solidaritas sesama teman.

Dari temuan yang ada, tim peneliti mengajukan tiga saran praktis untuk mengurangi munculnya aksi-aksi pemogokan di masa-masa mendatang. Pertama, perlu diefektifkannya fungsi SPSI, khususnya fungsi penyaluran kepentingan dan aspirasi kaum buruh. Kedua, pihak perusahaan harus memberikan upah, minimal, sesuai KUM dan hak-hak

buruh sebagaimana yang semestinya mereka peroleh. Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih berat dan tegas kepada perusahaan yang tidak memberi upah sesuai KUM dan melanggar hak-hak buruh.

(L.P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair,
048/P4M/DPPM/L.3311/94/EBI/1994, 15 Juni 1994)

